

BAB IV

SIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data, fakta, analisis, dan pembahasan penulis pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerimaan PBB-P2 di Kota Pematangsiantar secara umum terus meningkat selama tahun 2016-2019 dan memiliki potensi dalam kategori potensial berdasarkan analisis potensi yang telah penulis lakukan. Namun penerimaan PBB-P2 yang terus meningkat masih belum menunjukkan realisasi pendapatan yang memenuhi target yang ditentukan tiap tahunnya. Terjadinya penunggakan dalam pembayaran PBB-P2 di Kota Pematangsiantar yang memengaruhi penerimaan PBB-P2 tidak mencapai target.
2. Kendala yang dihadapi oleh BPKD dalam upaya meningkatkan penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan adalah perbedaan data yang dimiliki oleh BPKD dan kondisi di lapangan. Perbedaan data yang meliputi kondisi objek pajak, subjek pajak yang tidak ada, dan pendaftaran objek pajak yang sama. Kendala yang dihadapi dalam melakukan tindakan pemutakhiran data adalah wajib pajak yang kurang kooperatif, dan sumber daya yang terbatas.

3. Kegiatan yang dilakukan oleh BPKD dalam upaya meningkatkan penerimaan PBB-P2 adalah meningkatkan kualitas layanan, sosialisasi terhadap wajib pajak, dan kegiatan pemutakhiran data. Untuk memperoleh peningkatan penerimaan PBB-P2 dengan melakukan kualitas pelayanan yang optimal terhadap wajib pajak. Kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai pajak daerah khususnya PBB-P2 yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar perpajakan dan pentingnya peran perpajakan kepada wajib pajak. Pemutakhiran data adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperbarui data yang dimiliki oleh BPPD secara terus menerus agar sesuai dengan kondisi lapangan.

4.2 Saran

Dalam hal ini, penulis akan memberikan beberapa saran terkait upaya untuk optimalisasi penerimaan PBB-P2 di Kota Pematangsiantar yaitu sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, BPKD Kota Pematangsiantar dapat melakukan upaya berupa optimalisasi sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Meningkatkan sinergi antara pegawai baik internal maupun eksternal dalam rangka kelancaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi dari masing-masing bidang.
3. Mengoptimalkan kegiatan pemutakhiran data untuk memperoleh kondisi di lapangan dari objek pajak, sehingga diharapkan dapat meminimalisir perbedaan data antara BPKD dan di lapangan.